

TESIS

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH
BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA
ANAGATA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

NISSA AULIA SYAFITRI

NIM. 2420215320022

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN
PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

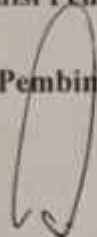
**NISSA AULIA SYAFITRI
NIM. 2420215320022**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN
PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA
NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK
PIDANA KORUPSI
Nama : Nissa Aulia Syafitri
NIM : 2420215320022

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202 08199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



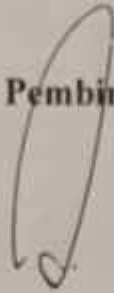
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805 02200112 2 002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 27 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202 08199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805 02200112 2 002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO DAN PESEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Long story short, I survived”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap proses kehidupan penulis.

Kepada Mama dan Papah yang telah memberikan dukungan dan doa yang Mama dan Papah panjatkan di setiap sujud malam, setiap pengorbanan yang tidak pernah diucapkan namun selalu dirasakan, serta setiap dukungan yang diberikan tanpa pamrih menjadi kekuatan terbesar saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada Adik dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan sampai tesis ini bisa saya selesaikan, saya berterima kasih.

Serta kepada Dosen Pembimbing Tesis saya persembahkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan dalam membimbing saya sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nissa Aulia Syafitri

NIM : 2420215320022

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Nissa Aulia Syafitri
NIM. 2420215320022

SYAFITRI, NISSA AULIA. 2026. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. Mispansyah, S.H., M.H. 109 halaman.

RINGKASAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi nasional melalui penghimpunan dan pengelolaan aset negara. Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai ekonomi aset negara melalui pengelolaan investasi secara profesional. Dalam menjalankan fungsinya, BPI Danantara mengelola sumber daya yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan, hasil investasi, serta sumber pendanaan lainnya yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan kerugian yang dialami BPI Danantara, khususnya apakah kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis apabila terjadi kerugian keuangan pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara apabila terjadi Pratik korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur mengenai keuangan negara, BUMN, BPI Danantara, serta tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, pertanggungjawaban pidana, *Business Judgment Rule*, dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kerugian yang dialami BPI Danantara tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta adanya pengurangan nilai aset atau kerugian investasi. Penentuan suatu kerugian sebagai kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui analisis terhadap beberapa aspek, yaitu status objek yang mengalami kerugian, hubungan aset tersebut dengan keuangan negara, adanya kerugian yang nyata atau dapat dihitung, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, serta penyebab timbulnya kerugian tersebut. Dalam hal aset yang mengalami kerugian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga masih berada dalam ruang lingkup perlindungan keuangan negara. Dengan demikian, status kekayaan negara yang dipisahkan tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai bagian dari keuangan negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak setiap kerugian investasi yang dialami BPI Danantara dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Kerugian yang timbul akibat fluktuasi pasar, perubahan kondisi ekonomi, atau risiko investasi yang wajar merupakan konsekuensi dari aktivitas bisnis dan pada prinsipnya tidak dapat dipersamakan dengan kerugian negara yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, konflik kepentingan, manipulasi, atau tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian adanya unsur tindak pidana menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membedakan antara risiko bisnis dan kerugian negara akibat korupsi.

Dalam pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap tindakan pengurus BPI Danantara tidak dapat hanya didasarkan pada timbulnya kerugian investasi. Penegakan hukum harus mempertimbangkan apakah keputusan investasi tersebut telah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai dengan prinsip *Business Judgment Rule* dan *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip tersebut penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pengelola investasi yang telah bertindak secara profesional dalam menjalankan kewenangannya. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka pengurus maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan investasi oleh BPI Danantara masih menyisakan beberapa kekosongan dan ketidakjelasan norma. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, dan sumber pendanaan BPI Danantara, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur parameter penentuan kerugian keuangan negara dalam kegiatan investasi, batasan antara risiko bisnis dengan kerugian akibat tindak pidana korupsi, maupun mekanisme pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan karakteristik investasi negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum serta mengurangi kepastian hukum bagi pengelola investasi negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi pada BPI Danantara tidak secara otomatis merupakan kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Penentuan status kerugian harus didasarkan pada analisis terhadap status aset yang dirugikan, penyebab timbulnya kerugian, hubungan kausal, serta terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kerugian investasi yang merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang wajar tidak dapat dipidanakan hanya karena mengakibatkan berkurangnya nilai investasi. Sebaliknya, apabila kerugian tersebut timbul akibat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka kerugian tersebut dapat

dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penyusunan pedoman yang lebih komprehensif mengenai parameter penentuan kerugian keuangan negara dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan investasi oleh BPI Danantara, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara, kepastian hukum bagi pengelola investasi, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

SYAFITRI, NISSA AULIA. 2026. Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Program Magister Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** 109 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: BPI Danantara, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, *Business Judgment Rule*.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengelolaan investasi strategis negara menjadi isu hukum yang semakin penting sejak dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Belum adanya pengaturan yang secara tegas membedakan risiko bisnis yang wajar dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kerugian keuangan pada BPI Danantara dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengaturan hukum yang ideal dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan pada BPI Danantara tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi, melainkan harus didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan melalui Teori Identifikasi, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability*, sedangkan *Business Judgment Rule* berfungsi sebagai batas antara risiko bisnis yang sah dan tindak pidana. Selain itu, pengaturan hukum yang berlaku masih bersifat parsial sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik

untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

SYAFITRI, NISSA AULIA. 2026. *State Financial Losses in the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: An Anti-Corruption Criminal Law Perspective*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. 109 pages.

ABSTRACT

Keywords: BPI Danantara, Corporate Criminal Liability, Corruption Crimes, State Financial Losses, Business Judgment Rule

State financial losses arising in the management of state strategic investments have become an increasingly important legal issue since the establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara). The absence of a regulation that expressly distinguishes reasonable business risk from unlawful acts creates uncertainty regarding criminal liability for losses that occur.

This study aims to analyze whether financial losses at BPI Danantara can be qualified as state financial losses and examine the ideal form of corporate criminal liability and legal arrangements in handling them.

This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach supported by primary and secondary legal materials. The results of the study show that financial losses at BPI Danantara cannot necessarily be categorized as state financial losses from the perspective of corruption crimes, but must be based on unlawful acts, abuse of authority, or corrupt practices.

Corporate criminal liability can be applied through the Theory of Identification, Strict Liability, and Vicarious Liability, while Business Judgment Rule serves as a boundary between legitimate business risks and criminal acts. In addition, the applicable legal arrangements are still partial, so more comprehensive and specific regulations are needed to ensure legal certainty, accountability, and protection of state finances.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”** ini dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Hukum Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang sangat terpelajar **Ibu Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terpelajar **Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terpelajar **Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan masukan-masukan berharga sejak awal penyusunan proposal hingga tesis ini dapat diselesaikan. Bimbingan, ilmu, dan teladan yang Bapak berikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi

juga dalam membentuk cara berpikir kritis dan bertanggung jawab sebagai seorang akademisi hukum;

4. Kepada **Tim Dosen Penguji** atas waktu, kritik, dan saran konstruktif yang telah diberikan demi penyempurnaan tesis ini;
5. Kepada **Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan;
6. Kepada **Kedua orang tua tercinta**, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, dan dukungan moril maupun materil yang menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini;
7. Kepada **Keluarga Besar PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan**, atas doa dan dukungan penuh yang selalu membersamai Penulis dari awal perkuliahan hingga proses dalam menyelesaikan penelitian tesis ini;
8. Kepada **Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan**, di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang saling diberikan selama menempuh Pendidikan ini;
9. Kepada **Seluruh pihak**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.

Hormat Penulis,

Nissa Aulia Syafitri
NIM. 2420215320022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
BAB II KERUGIAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	28
A. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	28
B. Kerugian Keuangan Negara	45
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA APABILA TERJADI PRAKTIK KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	62
A. Pertanggungjawaban Pidana Pada BPI Danantara Apabila Terjadi Praktik Korupsi	62
B. Pengaturan Ideal Untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Masa yang Akan Datang	90
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	